

ABSTRAK

Perlindungan terhadap penduduk sipil dalam situasi konflik bersenjata diatur langsung dalam hukum humaniter internasional. Dalam hukum humaniter internasional juga terdapat sebuah prinsip yang menekankan bahwa para pihak yang terlibat dalam suatu konflik bersenjata harus membedakan antara penduduk dan objek sipil dengan kombatan dan objek militer, yang dikenal sebagai prinsip pembeda. Namun realitanya, masih banyak ditemukan pelanggaran yang menyebabkan jatuhnya korban dari kelompok penduduk sipil. Skripsi ini ditulis untuk mengetahui landasan hukum terkait perlindungan penduduk sipil dalam situasi perang, dan implementasi pertanggungjawaban komando atas kasus pelanggaran hukum perang terutama dalam kasus pembantaian penduduk sipil di My Lai, Vietnam, serta menganalisis apakah tindakan pengadilan militer Amerika Serikat dalam mengadili Letnan William Calley atas pelanggaran tersebut sudah memenuhi kewajiban hukum humaniter. Penulisan dilakukan dengan pendekatan penelitian yuridis normatif dan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan metode analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian skripsi menunjukkan bahwa Pasal 27 Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 mengatur bahwa penyerangan dan pembunuhan yang dilakukan secara sengaja terhadap kelompok penduduk sipil, yang wajib dilindungi menurut pasal tersebut, merupakan sebuah pelanggaran berat terhadap ketentuan Konvensi-Konvensi Jenewa yang disebut *grave breaches*. Dalam kasus pembantaian My Lai, komandan-komandan militer Amerika Serikat merupakan salah satu faktor utama terjadinya pelanggaran-pelanggaran berat dalam operasi militer yang dilakukan. Pertanggungjawaban komando diterapkan sebagai acuan untuk mengadili para perwira yang terlibat dalam kasus tersebut. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa tindakan pengadilan militer Amerika Serikat sudah memenuhi kewajiban hukum humaniter internasional.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Komando, Hukum Humaniter Internasional, Kasus Pembantaian My Lai

ABSTRACT

The protection of civilians in situations of an armed conflict is regulated directly in international humanitarian law. There is also a principle in international humanitarian law which emphasizes that the parties involved in an armed conflict must distinguish between civilian populations and objects and combatants and military objects, which is known as the distinction principle. However, in reality, there are still many violations that cause casualties among civilian groups. This research was made to determine the legal basis related to the protection of civilians in war situations, and the implementation of command responsibility for cases of violations of the laws of war, especially in the case of massacre of civilians in My Lai, Vietnam, also to analyze whether the actions of the United States court martial of Lieutenant William Calley for the violations fulfill humanitarian law obligations. The research was carried out using a normative juridical research approach and using analytical descriptive research specifications. The data collection method used is literature study and qualitative data analysis methods. The results of the research shows that Article 27 of the 1949 Geneva Convention IV stipulates that attacks and murders carried out intentionally against groups of civilians, who must be protected according to the convention, constitute a serious violation of the provisions of the Geneva Conventions (grave breaches). In the case of the My Lai massacre, United States military commanders failure to act were one of the main factors in causing serious violations in the military operations carried out. Command responsibility is applied as a reference for prosecuting the officers involved in the case. This research also concludes that the actions of the United States military court have fulfilled international humanitarian law obligations.

Keywords: *Command Responsibility, International Humanitarian Law, The My Lai Massacre*